

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulhay, Marheinis, *Hukum Perdata*, Jakarta, Pembinaan UPN, 2006.
- Adam, Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung, Sinar Baru, 1985.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Adjie, Habib, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Adjie, Habib, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2015.
- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004 .
- Ali, Yunasril, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2014.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 2014.
- Budiono, Herlin, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, cet. 5*, Bandung, Citra Aditya, 2018.
- Camus, Albert, *Krisis Kebebasan*, Jakarta, Yayasan Obor, 1998.
- Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pendekatan Kontemporer, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Halim, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta, Konstitusi Press & Citra Media, 2006.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2003.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta, Prenada Media, 2010.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2001.
- Marpi, Yupiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya, PT. Zona Media Mandiri, 2020,.
- Meliala, Djaja S, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke 3, cet .1*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Moegni, M.A. Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982.
- Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT*, Yogyakarta, Karya Media, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 2002.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.

- Naja, Daeng, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali Persada, 1993.
- Parlindungan, A. P., *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1999.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- R.Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, Jakarta Pusat, Pradnya Paramita, 1978.
- R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985.
- Salim, HS., *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2019.
- Satrio, J, *Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6. Bandung, Putra A Bardin, 1999.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media, 2015.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2003.
- Syarifin, pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.

Tobing G.H.S, Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999.

Umar, Dzulkifli dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Surabaya, Mahirsindo Utama, 2014.

Untung, Budi, *Hukum dan Etika Bisnis*, Yogyakarta, Andi Offset, 2012.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

## C. Jurnal

Addi Fauzani, Muhammad, “Problematisasi Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1, Tahun. 2020

Adolf, Jozan, Widhi Handoko, Muhamad Azhar, “Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan”, *NOTARIUS*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2020.

Afifah, Kunni, “Tanggung Jawab dan Pelindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.2, No. 1, Tahun 2017

Agire Medahalyusa, Jeanette, Achmad Busro, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan”, *NOTARIUS*, Vol. 16, No. 2, Tahun 2022.

Amalia, Dita , Ali Abdullah, “Pelindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 394/PK/PDT/2015)”, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2021.

Amatullah Fitri, Azizah “Tanggung Jawab Keperdataan Dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Notaris Yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah (Studi Putusan Studi Putusan Pengadilan Negeri Sur engadilan Negeri Surabaya Nomor 963/PDa Nomor 963/PDT.G/2016/PN.SBY)”, *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2021.

Asshiddiqie, Jimly, “Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Jurnal Renvoi*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2003.

Astriaana, Windi, Widodo Suryandono dan Pieter Latumenten, “Pelindungan Terhadap Pihak Ketiga dan Tanggung Jawab Notaris atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Para Pihak dan Notaris dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 59/PDT/2019/PT.BDG)”, *Notary Indonesian*, Vol. 2 No. 3, Tahun. 2020.

Dameria, Rini, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)”, *Law Journal*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2017.

Hadi Haerul Hadi, Safiulloh, “Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan penipuan (*Bedrog*)”, *Res Justitia*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2022.

Iftitah, Addien, “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya”, *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2014.

Jalal, Abdul, “Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2018.

Lienarto, Lhedrick, “Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non dalam Tindak Pidana di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 6, Tahun. 2016.

Maxellia, Lupita, "Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris dalam Prespektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Privat Law*, Vol. 2, No. 4, 2014.

Mayra, Hoyrinissa, “Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 1, Tahun 2021.

Pertiwi, Selly masdalia, I Nyoman Sirtha, dan I Made Pria Dharsana, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya,” Udayana University, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017.

Putu Eka Darma, I, “Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Terhadap Akta yang mengandung Cacat Hukum,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2015.

Purnayasa, Agus Toni, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembutan Akta Autentik”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2018.

Simanungkalit, Jessica Priscilla, “Perbuatan Melawan Hukum Ppat Dalam Pembuatan AJB Dengan Blangko Kosong”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 11, Tahun 2021.

Suhartati, Akbar B, “Analisis Pengajuan Pembatalan Akta Ke Pengadilan Oleh Notaris (Studi Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gowa)”, *PLEDOI*, Vol. 1, No. 1. Tahun. 2023.

Wibowo, Ufuk Robert , “Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta autentik Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan”, *Humani*, Vol. 10, No. 1, tahun 2020.

Wardhani, Lidya Christina, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017.

Zackia, Vanya Putri Ratna, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 09/PDT.G/2016/PN.MAM JUNCTO Putusan Nomor: 1544/PID.B/2019/PN.MKS)”, *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 4, Tahun 2021.

#### **D. Tesis**

Palenewen, Chandra Ernaldo, “Perbuatan Melawan Hukum Notaris Dalam Akta Pengikatan Jual-Beli (APJB) Dengan Blanko Kosong (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 211 K/Pdt/2006),” *Tesis*, Magister kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, , 2011.

Priambodo, Eka, “Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli dan Tuntutan Ganti Rugi,” *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, , 2011.

Santoso, Didi, “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996),” *Tesis*, Universitas Diponegoro, 2009.